

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. Objek dari penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa dengan periode penelitian 2012 – 2015. Berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 sampel pertahun, sehingga total observasi yang digunakan berjumlah 48 observasi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara opini audit terhadap tindak korupsi. Artinya bahwa opini audit yang membaik akan mengurangi adanya potensi tindak korupsi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah melaksanakan pemerintahan sesuai dengan standard dan aturan yang berlaku. Namun jika pemerintah daerah tidak melakukan pemerintahan secara baik dan mendapatkan opini audit yang tidak begitu baik maka potensi terjadinya tindak korupsi di kabupaten/kota tersebut meningkat.

2. Terdapat pengaruh signifikan antara temuan audit terhadap tindak korupsi. Artinya apabila temuan audit yang didapatkan oleh BPK pada suatu kabupaten/kota semakin banyak maka potensi terjadinya tindak korupsi di kabupaten/ kota tersebut cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih belum mengikuti standar serta aturan yang ada secara maksimal sehingga dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah masih ditemukan beberapa temuan – temuan. Namun jika temuan audit yang pada kabupaten/kota tersebut sedikit hal ini menunjukkan bahwa potensi adanya tindak korupsi semakin kecil.
3. Terdapat pengaruh signifikan antara tindak lanjut hasil audit terhadap tindak korupsi. Artinya apabila rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada kabupaten/kota ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan baik akan mengurangi potensi adanya tindak korupsi di kabupaten/kota tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah secara bersungguh – sungguh memperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan sehingga untuk adanya potensi tindak korupsi sangat kecil karena pemerintah sendiri meminimalisirnya dengan memperbaiki kesalahan – kesalahan yang ditemukan oleh BPK. Namun jika rekomendasi yang diberikan tidak di tindak lanjuti dengan baik maka potensi adanya tindak korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut meningkat.

## **B. Implikasi**

Terjadinya tindak pidana korupsi merupakan faktor penghancur dari kokohnya sebuah institusi. Institusi yang terdapat tindak korupsi tentunya tidak akan berkembang terlebih institusi di pemerintahan akan kehilangan kepercayaannya dari masyarakat. Tindak korupsi yang sudah menjamur di Indonesia terutama di pemerintahan sudah seharusnya mulai dikikis agar tidak terus berkembang. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak harusnya dapat mengendalikan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi.

Bagi pemerintah daerah melihat dari berbagai temuan yang banyak terjadi hingga dapat menyebabkan kerugian pada daerah perlu lebih mewaspadaai pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, lebih berhati – hati dalam prosedur penyelenggaraan negara agar meminimalisir pelanggaran yang nantinya akan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Bagi pemerintah pusat, perlunya penghargaan bagi pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP membuat pemerintah daerah akan berlomba – lomba untuk memperbaiki pengelolaan keuangan serta operasional pemerintahannya. Hal ini mengingat sesuai dengan hasil pengujian ini bahwa opini audit berpengaruh terhadap turunnya tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah.

Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi membuat BPK perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan

oleh pemerintah daerah. Peran auditor dalam pengawasan tindak lanjut hasil audit ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah.

Perlunya pengawasan yang terintegrasi antara BPK dengan KPK akan sangat membantu dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Kedua lembaga yang sama – sama memiliki fungsi pengawasan haruslah berkoordinasi dengan baik sehingga penyimpangan serta pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara maksimal.

Bagi masyarakat yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan baik dari segi pengelolaan keuangan daerah dan semua kegiatan operasional yang dilakukan dilingkungan pemerintahan. Peran aktif masyarakat pun sangat penting dalam melaporkan indikasi adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar kepada KPK.

### **C. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Sampel dari penelitian ini yang hanya pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Pulau Jawa sehingga belum dapat menggambarkan kondisi seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia

2. Periode penelitian ini hanya empat tahun, yaitu 2012, 2013, 2014, dan 2015
3. Kurangnya atau terbatasnya kemampuan variabel independen yang menjelaskan variabel dependen

Berdasarkan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memilih sampel seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia
2. Menambahkan periode penelitian dan menggunakan tahun terbaru agar hasil lebih optimal.
3. Menambahkan variabel lainnya yang diduga memiliki keterkaitan terhadap tingkat korupsi salah satunya pengungkapan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal.
4. Memisahkan setiap variabel sesuai dengan kategori agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam. Hal tersebut seperti opini audit dipisahkan menjadi WTP, WDP, TW, TMP dan di peringkat sesuai dengan tingkat opini. Kemudian temuan audit dapat dipisahkan menjadi temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang – undangan.